



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KPKNL JAKARTA IV



KPKNL JAKARTA IV

LAPORAN KINERJA 2021



Daftar Isi

BAB I

KATA PENGANTAR - i
RINGKASAN EKSEKUTIF - iii

PENDAHULUAN

- A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi KPKNL Jakarta IV - 1
- B. Peran Strategis KPKNL Jakarta IV - 4
- C. Permasalahan Utama Yang Berkaitan dengan Pencapaian Kinerja - 5
- D. Sistematika Laporan - 6

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis - 7
- B. Penetapan Kinerja - 9

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi - 18
- B. Realisasi Anggaran - 28

BAB IV

PENUTUP

- A. Simpulan Umum - 29
- B. Strategi Pemecahan Masalah Untuk Tahun Mendatang - 29

Lampiran

- Kontrak Kinerja Kepala KPKNL Jakarta IV Tahun 2021
- Formulir Pengukuran Kinerja

PENGANTAR



Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta sebagai tindak lanjut nota dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan nomor ND-53/KN.1/2021 tanggal 04 Januari 2022 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2021, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV telah menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2021. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja dan merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis KPKNL Jakarta IV pada Tahun 2021.

Dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, DJKN telah menerapkan sistem *Balance Scorecard (BSC)* sebagai instrumen dalam pengelolaan kinerja. *Performance* KPKNL Jakarta IV dinilai berdasarkan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sesuai dengan kontrak kinerja KPKNL Jakarta IV Tahun 2021. Oleh karena itu pengukuran kinerja dalam Laporan Kinerja Tahun 2021 berdasarkan hasil capaian kinerja IKU berbasis BSC. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2021, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Jakarta IV Tahun 2021 sebesar **108,91%**. Hasil tersebut merupakan capaian kinerja KPKNL Jakarta IV sesuai dengan Peta Strategis KPKNL Jakarta IV Tahun 2021.

Laporan Kinerja KPKNL Jakarta IV Tahun 2021 ini kami harapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas upaya pencapaian visi dan misi yang diemban KPKNL Jakarta IV. Tuntutan masyarakat yang makin tinggi atas kualitas layanan pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang harus dijawab dengan perbaikan yang terus-menerus menuju kesempurnaan. Dengan semangat kerja cerdas dan dilandasi oleh nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan, maka tugas yang diemban dapat kita selesaikan sesuai harapan publik.

Kepada seluruh pegawai KPKNL Jakarta IV yang telah menyumbangkan karsa dan karya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja ini, kami sampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya dan kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Kepala KPKNL Jakarta IV,

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke with a large loop at the end, and a smaller loop at the beginning.

Karman

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Tahun 2021 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil (*outcome*). Laporan Kinerja KPKNL Jakarta IV merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis. Tujuan/sasaran strategis dalam Laporan Kinerja tersebut mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) DJKN 2020-2024.

Laporan Kinerja mempunyai fungsi sebagai alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif, dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Jakarta IV menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan masyarakat. Selain itu, Laporan Kinerja juga merupakan salah satu alat untuk memacu peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat pada setiap unit di lingkungan Kementerian Keuangan. Sebagai salah satu unit eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), KPKNL Jakarta IV mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. Dalam melaksanakan tugasnya, KPKNL Jakarta IV mempunyai fungsi: (1) inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara; (2) registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara; (3) registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang; (4) penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara; (5) pelaksanaan pelayanan penilaian; (6) pelaksanaan pelayanan lelang; (7) penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang; (8) pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan; (9) pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain; (10) pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang; (11) inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan; (12) pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang; (13) verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; (14) pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, visi dan misi KPKNL Jakarta IV sejalan dengan visi dan misi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Visi DJKN untuk tahun 2020-2024 adalah **“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”**. Untuk mewujudkan visi tersebut, telah ditetapkan 5 (lima) misi DJKN, yaitu:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategik organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis KPKNL Jakarta IV adalah sejalan dan menyesuaikan dengan tujuan DJKN, yaitu:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial;
2. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;
3. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien;
4. Birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien.

Seiring dengan perjalanan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan mengacu pada visi dan misi tersebut, serta untuk mencapai tujuan yang akan diraih, maka dirumuskan sasaran strategis yang dituangkan dalam peta strategis. Pengukuran kinerja merupakan penilaian terhadap IKU yang telah diidentifikasi untuk mencapai sasaran strategis dan tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi KPKNL Jakarta IV. Sesuai dengan Peta Strategis KPKNL Jakarta IV Tahun 2021, telah ditetapkan 10 (sepuluh) sasaran strategis yang merupakan Kontrak Kinerja KPKNL Jakarta IV Tahun 2021.

Sasaran strategis satu yaitu Sasaran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal yang terdiri dari 3 (tiga) IKU yaitu: (1) Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

dengan target untuk tahun 2021 sebesar 62%. Realisasi pada tahun 2020 adalah sebesar 100% dari target 100% (2) Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang dengan target untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp48.061.456.932,91 dengan presentase 100%. IKU ini berasal dari penerimaan PNBPN dari Pengelolaan BMN, PNBPN dari Piutang Negara dan PNBPN Lelang. Persentase realisasi nilai manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan negara dengan realisasi IKU tahun 2020 adalah sebesar 129,11% (3) Persentase Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d. 2017) dengan target untuk tahun 2021 adalah sebesar 100% dengan nilai Rp192.573.422.774,16, pada tahun 2020, tingkat realisasi outstanding piutang negara sebesar 0,18% dari target 3%.

Sasaran strategis dua yaitu Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa. Terdapat 2 (dua) IKU yaitu (1) Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang dengan target untuk tahun 2021 sebesar 88,50. Realisasi di tahun 2020 sebesar 99,69 dari target 88 (Skala 100) (2) Persentase realisasi pokok lelang dengan target untuk tahun 2021 sebesar 100%. atau dengan nilai Rp352.000.000.000,00 sedangkan realisasi dari tahun 2020 sebesar 76,07%.

Sasaran strategis tiga yaitu Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*, Efektif, dan Efisien terdapat 1 (satu) IKU yaitu Indeks kepuasan pengguna layanan pada KPKNL. Adapun realisasi IKU tahun 2020 sebesar 4,87 (skala 5). Sedangkan target untuk tahun 2021 sebesar 4,74 (skala 5).

Sasaran strategis empat yaitu Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif yang terdiri dari 3 (tiga) IKU yaitu (1) Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan dengan target IKU pada tahun 2021 adalah 100% atau sebanyak 14, sedangkan target IKU tahun 2020 adalah 0% (IKU ini dikoreksi dengan target 0% karena adanya Bencana Non-Alam *Novel Coronavirus Disease*). (2) Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) dengan realisasi di tahun 2020 mencapai 100% dengan target 100%, sedangkan target di tahun 2021 sebesar 100% atau sebanyak 157 (3) Realisasi Deviasi ketergunaan hasil penilaian dengan target di tahun 2021 sebesar 22%. Pada tahun 2020 realisasi sebesar 0,94% dari target sebesar 30%.

Sasaran strategis lima yaitu Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif, terdiri dari 4 (empat) IKU yaitu: (1) Persentase efektivitas penyelesaian BKPN dengan realisasi di tahun 2020 mencapai 101,02%, sedang target di tahun 2021 sebesar 100% atau dengan nilai 2800 BKPN, (2) Persentase Produktivitas lelang dengan realisasi tahun 2020 sebesar 49,26% dari target 34%, sedang target di tahun 2021 sebesar 35%. (3) Persentase pelaksanaan lelang *e-auction* dan *e-conventional auction* dengan target di tahun 2021 adalah sebesar 92% dari total pelaksanaan lelang. Realisasi di tahun 2020 mencapai 100% dari target sebesar 90% (4) Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN dengan target di tahun 2021 sebesar 12,5%, IKU ini belum terdapat di tahun 2020.

Sasaran strategis enam yaitu Edukasi yang Efektif. Terdapat 1 (satu) IKU pada sasaran strategis ini yaitu Tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi. Adapun realisasi IKU dimaksud untuk tahun 2020 dengan indeks sebesar 98,17 dari target 95 (skala 100). Sedangkan target untuk tahun 2021 dengan indeks sebesar 95,5.

Sasaran strategis tujuh adalah Pengawasan dan Pengendalian Mutu yang Efektif. Pada Tahun 2021, sasaran strategis ini terdiri dari 1 (satu) IKU yaitu Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara dengan target tahun 2021 sebesar 80%. Pada tahun 2020 realisasi Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset mencapai 85,14%.

Sasaran strategis kedelapan adalah SDM yang Kompeten, terdapat 1 (satu) IKU yaitu Persentase pengembangan kompetensi pegawai dengan realisasi di tahun 2020 mencapai 120%, sedang dengan target tahun 2021 sebesar 100%.

Sasaran strategis sembilan adalah Organisasi yang *Fit for Purpose*, terdapat 3 (tiga) IKU di dalamnya yaitu: (1) Nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBBM dengan target tahun 2021 sebesar 85. (2) Nilai hasil *review* pengelolaan kinerja dengan realisasi di tahun 2020 mencapai 98,80, sedang target di tahun 2021 sebesar 75. (3) Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Pejabat Administrator dengan target tahun 2021 sebesar 80.

Sasaran strategis kesepuluh adalah Pengelolaan Keuangan yang Optimal yang terdiri dari 1 (satu) IKU, yaitu Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran. Pada Tahun 2020 realisasi sebesar 95,66% dari target 95% sedangkan target tahun 2021 sebesar 95.5%.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV merupakan unit Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tanggal 06 November 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.01/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Sesuai dengan pasal 30 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, KPKNL menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
- b. registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c. registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang;
- d. penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara;
- e. pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
- h. pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan;
- i. pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain;
- j. pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang;
- k. inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan;
- l. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang;

- m. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;
- n. pelaksanaan administrasi KPKNL.

Struktur Organisasi KPKNL Jakarta IV terdiri dari:

- a. Subbagian Umum;
- b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;
- c. Seksi Pelayanan Penilaian;
- d. Seksi Piutang Negara;
- e. Seksi Pelayanan Lelang;
- f. Seksi Hukum dan Informasi;
- g. Seksi Kepatuhan Internal; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.



Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPKNL Jakarta IV didukung oleh sumber daya manusia dalam berbagai bidang dan keahlian. Jumlah pegawai KPKNL Jakarta IV pada 31 Desember 2021 adalah sebanyak 47 pegawai dengan komposisi pegawai sebagai berikut:

I. Berdasarkan Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Golongan				Total Pegawai
		I	II	III	IV	
1.	SD	-	-	-	-	0
2.	SLTP	-	-	-	-	0
3.	SLTA	-	0	3	-	3

4.	DI/DII	-	3	1	-	4
5.	DIII	-	8	4	-	12
6.	DIV/Sarjana	-	0	22	0	22
7.	Pasca Sarjana/Master	-	-	4	2	6
8.	Doktor/S3	-	-	-	-	0
TOTAL		0	11	34	2	47

II. Berdasarkan Usia

Kelompok Umur	Golongan Ruang				Jumlah
	I	II	III	IV	
18-30	0	8	1	0	8
31-40	0	3	17	0	20
41-50	0	0	11	1	12
diasas 50	0	0	6	1	7
Jumlah	0	11	34	2	47

III. Tenaga Fungsional

No.	Jabatan Fungsional	Jumlah Orang
1.	Juru Sita	6
2.	Pemeriksa	3
3.	Pranata Keuangan APBN	1
4.	Pelelang (Jabfung)	5
5.	Penilai Kekayaan Negara	5
6.	Penilai (Jabfung)	5
7.	Pejabat Lelang	4
TOTAL		29

B. Peran Strategis Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV

Sebagai organisasi yang memiliki fungsi pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang, KPKNL Jakarta IV memiliki peran strategis sebagai berikut:

a. Pengelolaan kekayaan negara

Sebagai pengelola kekayaan Negara, KPKNL Jakarta IV turut berperan dalam mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara. Peningkatan daya guna dan hasil guna terutama difokuskan pada pemanfaatan kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara, dan penatausahaan kekayaan negara. Selain itu, KPKNL Jakarta IV selaku *asset manager* yang efektif dan produktif mengemban tugas menata manajemen aset negara dan menjadikan aset sebagai salah satu indikator peningkatan efektivitas APBN, yaitu melalui optimalisasi aset dalam peningkatan pendapatan negara dan penghematan belanja modal dan belanja pemeliharaan.

b. Penilaian

Penilaian terhadap kekayaan negara merupakan langkah awal dari proses pengelolaan kekayaan negara, setelah itu dilakukan inventarisasi menuju optimalisasi pengelolaan kekayaan negara. Tugas penilaian kekayaan negara meliputi kegiatan standarisasi, bimbingan teknis, analisis, supervisi, evaluasi, dan rekomendasi dibidang penilaian. Kegiatan penilaian dimaksudkan untuk memperoleh estimasi atau perkiraan nilai wajar dari setiap kekayaan negara berupa tanah, bangunan, kendaraan dan barang milik negara lainnya yang berada pada lingkup Kementerian/Lembaga Negara. Kegiatan penilaian dilakukan untuk kepentingan pengambilan keputusan pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMN.

c. Pengurusan Piutang Negara

Pengurusan Piutang Negara bertujuan untuk mengamankan keuangan negara dengan melakukan penagihan dan pengurusan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah dan badan-badan usaha yang dikuasai oleh negara baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perjanjian, peraturan perundangan dan sebab apapun. Sejak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006, piutang macet yang berasal dari BUMN perbankan, pengurusannya tidak lagi diserahkan kepada PUPN. Fokus pengurusan dilakukan terhadap piutang negara yang berasal dari BLU dan instansi pemerintah.

d. Pelayanan lelang;

Berlakunya PMK Nomor 213/PMK.06/2020 tentang perubahan atas PMK Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dimana Pelayanan lelang bertujuan untuk menjadikan lelang sebagai sarana transaksi penjualan aset secara umum sebagaimana fungsi pasar pada umumnya. Selain itu, lelang merupakan pelaksanaan eksekusi terhadap suatu

putusan/penetapan pengadilan maupun PUPN. Lelang mempunyai manfaat nilai lebih dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu lebih transparan, akuntabel, efisien dan dapat lebih menjamin kepastian hukum. Risalah Lelang yang merupakan akta otentik berfungsi sebagai *akta van transport* untuk kepentingan peralihan hak. DJKN diharapkan menjadi akselerator agar paradigma lelang meresap kedalam "*mindset*" masyarakat, sehingga memandang lelang seperti pelaksanaan jual beli biasa dan dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.

Penawaran lelang melalui elektronik (*email*) dan internet (*e-auction*) dapat dilaksanakan tanpa kehadiran peserta lelang. *E-auction* dapat dilaksanakan untuk semua jenis lelang, yaitu lelang eksekusi, lelang non eksekusi wajib, dan lelang non-eksekusi sukarela. *E-auction* merupakan aplikasi berbasis internet yang dapat diakses melalui *browser* pada alamat www.lelang.go.id. Selain dengan komputer atau laptop, aplikasi juga dapat diakses melalui telepon pintar berbasis android. Dengan penggunaan media internet, peserta lelang dapat mengikuti lelang internet dari dan dimanapun berada serta tidak perlu hadir di tempat pelaksanaan lelang. Hal ini tentu saja semakin memudahkan siapa saja untuk ikut menjadi peserta lelang.

e. Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Pembiayaan APBN

Biaya Administrasi (Biad) Pengurusan Piutang Negara merupakan hasil dari pelayanan pengurusan piutang negara yang diterima oleh KPKNL. Sedangkan dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL memperoleh hasil berupa Bea Lelang. Kedua instrumen penerimaan tersebut selanjutnya disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

C. Permasalahan Utama Yang Berkaitan Dengan Pencapaian Kinerja

Pada pelaksanaan kegiatan, secara umum pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam tahun 2021 telah sesuai dengan yang ditargetkan dan banyak diantaranya mencapai nilai di atas 100%. Meski semua sasaran strategis mencapai target, namun terdapat beberapa persoalan/permasalahan utama yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dimaksud antara lain:

1. Adanya pembatasan kegiatan masyarakat oleh Pemerintah mengakibatkan kegiatan survey asset yang masuk target portofolio aset belum bisa dilaksanakan 100%;
2. Perlunya peningkatan pengetahuan dan kompetensi pada satuan kerja terkait pengisian form pendataan portofolio aset untuk meminimalisir kesalahan pada saat pengisian form pendataan;
3. Peningkatan pemahaman pada satuan kerja untuk melakukan penginputan tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset;

4. Beberapa Debitur tidak ditemukan keberadaanya sehingga menjadi kendala dalam penerbitan surat keterangan tidak mampu;
5. Terdapat aset kredit yang diserahkan ke PUPN memiliki kualitas rendah dan nilai jaminan tidak mencukupi untuk menjamin hutang, aset kredit yang memiliki permasalahan hukum, dan aset yang dokumennya kurang lengkap, sehingga sulit untuk dicapai *recovery*-nya;
6. Daya beli masyarakat terhadap lelang menurun karena bencana *Covid-19*;
7. Persepsi masyarakat terhadap lelang sebagai cara penjualan barang yang dapat menghasilkan harga yang optimal belum merata di seluruh lapisan masyarakat serta masih banyak gugatan/perlawanan/keberatan terhadap pelaksanaan lelang hak tanggungan, fidusia dan kepailitan sebagai penyelesaian dari kredit macet.

D. Sistematika Laporan

Untuk memudahkan dalam memahami isi laporan, maka digunakan sistematika pelaporan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

BAB II Perencanaan Kinerja

BAB III Akuntabilitas Kinerja

BAB IV Penutup

Sesuai dengan tugas dan fungsi KPKNL Jakarta IV sebagaimana yang ditetapkan, terdapat beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh KPKNL Jakarta IV selama tahun 2021 yang akan kami uraikan dalam Bab III Laporan ini.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja KPKNL Jakarta IV tahun 2021 ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perencanaan untuk meningkatkan kinerja KPKNL Jakarta IV di tahun yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan strategis adalah serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien dan koordinatif serta disusun mengikuti alur pikir tertentu. Didalam renstra 2020-2024, DJKN merancang rencana strategisnya dalam suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan strategis DJKN disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Diktum Kedua Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis DJKN yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Nomor 245/KN/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024. Rencana Strategis DJKN memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. Untuk melaksanakan hal tersebut, ditetapkan juga Keputusan Kepala KPKNL Jakarta IV Nomor KEP-263/WKN.07/KNL.04/2020 tentang Rencana Strategis Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV Tahun 2020-2024. Visi dan misi KPKNL Jakarta IV sejalan dengan visi dan misi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Visi DJKN adalah “Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Pengertian profesional dalam visi tersebut bermakna bahwa tugas-tugas pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang dilaksanakan sesuai standar profesi dan standar keilmuan yang telah ditetapkan. Akuntabel artinya pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelaksanaan lelang dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat merupakan cita-cita dan arah dari tujuan akhir pengelolaan kekayaan negara sesuai dengan jiwa Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Sebagai wujud penjabaran visi yang telah dirumuskan tersebut, DJKN menetapkan 5 (lima) misi, yaitu:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Atas dasar visi dan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh KPKNL Jakarta IV sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis KPKNL Jakarta IV yaitu:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial;
2. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;
3. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien;
4. Birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien.

Dalam rangka mendukung pencapaian 4 (empat) tujuan tersebut, KPKNL Jakarta IV telah menetapkan sasaran strategis yang ingin dicapai KPKNL Jakarta IV, yaitu:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial adalah:
 - a. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif, dan optimal.
 - b. Pengelolaan investasi pemerintah yang memberi manfaat ekonomi, sosial dan lainnya.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan lelang yang modern terpercaya adalah pengelolaan lelang yang optimal.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien adalah penilaian yang berkualitas.
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai Tujuan Birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien adalah:
 - a. Organisasi dan SDM yang optimal.
 - b. Pengawasan dan pengendalian yang bernilai tambah.
 - c. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi.
 - d. Komunikasi publik yang efektif.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, KPKNL Jakarta IV melaksanakan program yaitu:

- Sosialisasi peraturan tentang pengelolaan BMN dan lelang kepada seluruh Satuan Kerja binaan KPKNL Jakarta IV;

- Melaksanakan e-rekon dengan satuan kerja terkait rekonsiliasi BMN yang dilakukan secara sistem;
- Peningkatan penagihan piutang negara secara intensif;
- Sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan pemahaman/persepsi masyarakat terhadap lelang sebagai cara penjualan barang yang menghasilkan harga yang optimal;
- Peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa dengan berpedoman pada SOP (khususnya terhadap SOP Layanan Unggulan);
- *Morning Call*, yang dilaksanakan secara periodik untuk pegawai KPKNL Jakarta IV;
- Usulan Pegawai KPKNL Jakarta IV untuk mengikuti diklat teknis maupun pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK);
- Membuat berbagai sistem aplikasi guna memudahkan tugas dan meningkatkan kinerja pegawai di KPKNL Jakarta IV.

B. Penetapan Kinerja

Penerapan *Balance Score Card* (BSC) di lingkungan KPKNL Jakarta IV dilengkapi dengan penetapan sasaran strategis utama *strategic outcome* pada tahun 2021 termasuk 20 IKU. Adapun rincian penjelasan dari masing-masing sasaran strategis termasuk indikator kinerja utama, dan realisasi tahun sebelumnya, serta target 2021 adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 1 PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA YANG OPTIMAL			
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2020	Target 2021
1. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	%	100%	62%
2. Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	%	129%	100%
3. Persentase Penurunan outstanding piutang negara	%	0,18%	100%
SASARAN STRATEGIS 2 PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YANG MEMENUHI HARAPAN PENGGUNA JASA			
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2020	Target 2021
1. Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	Indeks	99,69	88,5 (skala 100)
2. Persentase realisasi pokok lelang	%	76,07%%	100%

SASARAN STRATEGIS 3 BIROKRASI DAN LAYANAN PUBLIK YANG AGILE, EFEKTIF, DAN EFISIEN			
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2020	Target 2021
1. Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	Indeks	4,87	4,74 (skala 5)
SASARAN STRATEGIS 4 PENERAPAN TATA KELOLA KEKAYAAN NEGARA DAN PENILAIAN YANG EFEKTIF			
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2020	Target 2021
1. Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	%	0%	100%
2. Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	%	100%	100%
3. Deviasi ketergunaan hasil penilaian	%	0,94%	22%
SASARAN STRATEGIS 5 PENERAPAN TATA KELOLA PIUTANG NEGARA DAN LELANG YANG EFEKTIF			
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2020	Target 2021
1. Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	%	101,02%	100%
2. Persentase produktivitas lelang	%	49,26%	35%
3. Persentase pelaksanaan lelang <i>e-auction</i> dan <i>e-conventional auction</i>	%	100%	92%
4. Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	%	*N/A	12,5%
SASARAN STRATEGIS 6 EDUKASI YANG EFEKTIF			
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2020	Target 2021
1. Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	Indeks	98,17	95,5
SASARAN STRATEGIS 7 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN YANG EFEKTIF			
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2020	Target 2021
1. Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	%	85,14%	85%

SASARAN STRATEGIS 8 SDM YANG KOMPETEN			
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2020	Target 2021
1. Persentase pengembangan kompetensi pegawai	%	120%	100%
SASARAN STRATEGIS 9 ORGANISASI YANG FIT-FOR-PURPOSE			
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2020	Target 2021
1. Nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBBM	Indeks	*N/A	85
2. Nilai hasil <i>review</i> pengelolaan kinerja	Indeks	98,80	75
3. Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	Indeks	*N/A	80
SASARAN STRATEGIS 10 Pengelolaan Keuangan yang Optimal			
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2020	Target 2021
1. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	%	95,66%	95,5%

Ket:

* N/A = tidak tersedia, penjelasan akan disajikan dalam uraian sasaran strategis

Untuk menerjemahkan strategi ke dalam suatu tindakan, sebagai wujud dari pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, sejak awal 2008 Kementerian Keuangan telah menerapkan manajemen kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC). BSC berfungsi sebagai alat pengukuran kinerja agar tujuan organisasi tercapai dan terkelola secara efektif dan efisien. BSC dipilih sebagai sistem manajemen strategis dan pengukuran kinerja Kementerian Keuangan karena beberapa faktor, antara lain :

1. mampu menerjemahkan strategi organisasi dalam suatu tindakan.
2. memberikan pandangan yang komprehensif tentang kinerja organisasi dengan memperhitungkan perspektif finansial dan nonfinansial, serta lingkungan internal maupun eksternal organisasi dan keadaan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang
3. memberikan umpan balik untuk peningkatan/perbaikan kinerja pada periode berjalan dan peningkatan/perbaikan kinerja di masa mendatang.
4. memiliki konsep sebab akibat dimana pencapaian kinerja diperoleh dari serangkaian proses dari masing-masing sasaran strategis dan indikator kinerja.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi DJKN harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. BSC merupakan suatu

konsep yang menjabarkan strategi menjadi suatu tindakan dengan menetapkan tujuan strategisnya. Tujuan strategis merupakan faktor utama yang harus ada dalam BSC yang kemudian dikembangkan menjadi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerjanya. Tujuan strategis ini dipetakan kedalam suatu peta strategi. Peta strategi Kemenkeu-*three* Tahun 2021 sebagai berikut:



Peta strategi Kemenkeu-*three* Tahun 2021 mempunyai 4 perspektif, yaitu: *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Empat perspektif tersebut kemudian diuraikan kedalam 10 sasaran strategis (SS) dan 20 indikator kinerja utama (IKU) dengan peta strategis sebagai berikut:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal.

Sasaran strategis pengelolaan kekayaan negara yang optimal terdapat 3 (tiga) IKU yaitu: (1) Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK; (2) Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang; dan (3) Persentase Penurunan outstanding piutang negara.

Nilai manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan negara merupakan nilai penerimaan negara yang telah masuk ke kas negara dan nilai penghematan belanja yang diperoleh dari hasil pengelolaan kekayaan negara. Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari penerimaan dan hasil pemanfaatan maupun penjualan BMN pada Kementerian/Lembaga, penerimaan Biaya Administrasi dari pengurusan Piutang Negara dan penerimaan bea lelang ataupun hasil lelang

dari pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL Jakarta IV. IKU ini pada tahun 2021 ditargetkan 100% atau sebesar Rp48.061.456.932,91.

Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang secara optimal ditujukan untuk pengembalian (*recovery*) piutang negara yang tinggi ke negara dan pelaksanaan lelang yang mendorong terjualnya barang yang dilelang dengan harga yang tinggi. Pelayanan yang optimal akan berdampak pada sisi penerimaan negara bukan pajak yang dihasilkan dari biaya administrasi pengurusan piutang negara dan bea lelang dari proses pelayanan lelang.

Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara atau badan-badan yang baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh negara, berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun. Hasil dari pengurusan piutang negara antara lain berupa Piutang Negara yang Dapat Diselesaikan (PNDS) dan Biaya administrasi Pengurusan Piutang Negara.

2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa.

Sasaran strategis pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa terdapat 2 (dua) IKU yaitu: (1) Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang; (2) Persentase realisasi pokok lelang.

IKU Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Kekayaan Negara dan Lelang. IKU ini merupakan laporan pengoptimalan penyelesaian rincian hasil lelang setelah lelang dilaksanakan.

IKU Persentase realisasi pokok lelang dengan target sebesar Rp352.000.000.000,00 meliputi 2 komponen perhitungan yaitu: Target/Realisasi pokok lelang kelas I dengan target tahun 2021 sebesar Rp233.000.000.000,00 dan komponen lainnya yaitu target/realisasi pokok lelang pegadaian sebesar Rp119.000.000.000,00 dengan persentase realisasi sebesar 100%.

3. Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*, Efektif, dan Efisien

Sasaran strategis birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien terdapat 1 (satu) IKU yaitu: Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL. Adapun target IKU tahun 2021 sebesar 4,74.

Kepuasan pengguna layanan yang tinggi adalah ukuran untuk mengetahui apresiasi masyarakat khususnya pengguna jasa di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang atas pelayanan yang diberikan oleh KPKNL. Semakin baik pelayanan yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan pengguna layanan.

4. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif

Sasaran strategis penerapan tata kelola kekayaan negara dan penilaian yang efektif terdapat 3 (tiga) IKU yaitu: (1) Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan; (2) Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset); (3) Deviasi ketergunaan hasil penilaian.

Pelaksanaan sertifikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pemsertifikatan BMN berupa tanah, dengan pembagian tugas/kewajibannya masing-masing. Pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah terdiri dari tahapan permintaan kepada K/L mengenai jumlah BMN yang sudah bersertifikat dan belum bersertifikat, identifikasi dengan memetakan tanah belum bersertifikat pada K/L berdasarkan lokasi, luas tanah, nilai BMN dan nama pemilik, penyusunan data BMN belum bersertifikat yang diperkirakan dapat disertifikatkan, K/L melakukan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan sertifikasi untuk BMN yang tidak memiliki permasalahan, penyampaian rekomendasi BMN berupa tanah berstatus *clean and clear* (dokumen persyaratan sertifikasi lengkap dan tidak memiliki permasalahan) kepada BPN untuk disertifikatkan, dan pelaksanaan sertifikasi oleh BPN c.q. Kantor Pertanahan. Pada tahun 2021, target bidang tanah yang disertifikatkan berjumlah 14.

Portofolio Aset adalah evaluasi kinerja BMN yang merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Capaian portofolio aset diperoleh dari Jumlah aset yang dievaluasi kinerjanya /jumlah target aset yang akan di evaluasi. Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) dengan target pada tahun 2021 sebesar 100%.

Realisasi ini adalah rata-rata deviasi ketergunaan hasil penilaian pada tahun 2021. Deviasi terjadi karena nilai yang digunakan dalam persetujuan lebih besar dari hasil penilaian. Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian dengan target pada tahun 2021 lebih kecil dari 22%.

5. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

Sasaran strategis penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang efektif terdapat 4 (empat) IKU yaitu: (1) Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN; (2) Persentase produktivitas lelang; (3) Persentase pelaksanaan lelang *e-auction* dan *e-conventional auction*; (4) Deviasi Data PNBPFungsional DJKN.

Persentase efektivitas penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) dihitung dari jumlah BKPN yang Lunas, Ditarik, PSBDT, Dikembalikan. Target BKPN Selesai pada tahun 2021 dengan persentase 100% dari target 2.800 BKPN.

Persentase Produktivitas e-auction dengan target tahun 2021 sebesar 35% dari realisasi lelang tahun 2021. Dan persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction dengan target tahun 2021 sebesar 91% dari realisasi lelang tahun 2021.

Persentase Deviasi Data PNBPFungsional DJKN dengan target tahun 2021 sebesar 12,5%.

6. Edukasi yang Efektif

Sasaran strategis edukasi yang efektif terdapat 1 (satu) IKU yaitu: Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi.

Edukasi merupakan kegiatan pembinaan, bimbingan teknis, pemberian masukan, konsultasi, atau arahan yang dilaksanakan dalam lingkup internal maupun eksternal. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman atas proses bisnis yang harus dilakukan baik oleh pihak internal maupun eksternal sehingga output yang ditetapkan dalam suatu pekerjaan dapat tercapai. Ruang lingkup edukasi adalah sebagai berikut: 1). edukasi internal dari atasan/unit superintenden kepada bawahan/unit yang diawasi, dan 2). Edukasi eksternal dari kantor wilayah/KPKNL kepada pengguna layanan/masyarakat umum. Materi edukasi adalah terkait dengan pengelolaan barang milik negara, kekayaan negara lain-lain, kekayaan negara dipisahkan, pengurusan piutang negara, dan lelang. Edukasi dapat dikatakan efektif apabila pihak yang diedukasi memberikan *feedback* yang positif atas tingkat pemahaman materi dan proses edukasi yang telah dilakukan. Target tahun 2021 sebesar 95,50.

7. Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif

Sasaran strategis pengawasan dan pengendalian yang efektif terdapat 1 (satu) IKU yaitu: Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara.

Serangkaian kegiatan untuk memantau, memberikan penilaian atas pelaksanaan pekerjaan maupun laporan, menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan agar pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku dan menghasilkan output yang optimal. Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan mengidentifikasi pelaksanaan pekerjaan, kendala/permasalahan yang terjadi yang kemudian dilaporkan sebagai bahan perbaikan untuk periode selanjutnya. Sasaran strategis pengawasan dan pengendalian mutu yang efektif terdiri dari 1 (satu) IKU yaitu persentase tindak lanjut pengelolaan aset. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada K/L terutama terkait aspek utilisasi-nya. IKU ini difokuskan pada pemantauan utilisasi berupa pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh DJKN selaku pengelola barang. Target IKU ini pada tahun 2021 sebesar 85%

8. SDM yang Kompeten

Sasaran strategis SDM yang kompeten terdapat 1 (satu) IKU yaitu: Persentase pengembangan kompetensi pegawai.

Upaya KPKNL dalam membentuk SDM dilakukan dengan tertata dan berkelanjutan sehingga menghasilkan SDM yang berkompentensi tinggi. Pegawai yang memenuhi *hard competency* ditunjukkan dengan kesesuaian antara penempatan/posisi pegawai saat ini dengan kompetensi pegawai yang dimiliki. Kompetensi pegawai salah satunya ditunjukkan dari pendidikan dan pelatihan (diklat) yang pernah diikuti. Pendidikan dan pelatihan (diklat) tersebut meliputi pendidikan gelar Diploma I, Diploma III, S1/ DIV, atau gelar akademik lainnya; maupun pendidikan non-gelar yang meliputi diklat substansif dasar (DTSD), diklat substansif spesialisasi, *internship/on the job training*, *workshop*, bimbingan teknis, dan juga *in-house training* terkait bidang teknis. Target tahun 2021 adalah sebesar 100%.

9. Organisasi yang *Fit For Purpose*

Sasaran strategis organisasi yang *fit for purpose* terdapat 3 (tiga) IKU yaitu: (1) Nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBBM; (2) Nilai hasil *review* pengelolaan kinerja; (3) Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator.

Pembangunan ZI-WBK/WBBM merupakan salah satu langkah Pemerintah dalam mendukung reformasi birokrasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 dan telah ditegaskan kembali pada Renstra Kemenkeu tahun 2020-2024 dan Renstra DJKN 2020-2024. Sebelumnya KPKNL Jakarta IV telah meraih predikat ZI-WBK pada tahun 2019. Targetnya, pada tahun 2021 KPKNL Jakarta IV mampu meraih predikat ZI-WBBM dengan capaian minimum sebesar nilai 85.

Review pengelolaan kinerja tidak hanya dilakukan terhadap hal-hal yang dilakukan oleh Seksi KI, tetapi juga meliputi dokumentasi yang terdapat pada Subbagian Umum seperti dokumentasi Resource Forum Penyusunan Pagu Indikatif, DIPA dan POK. Target tahun 2021 adalah sebesar nilai 75.

Tingkat efektivitas FGD Pejabat Administrator merupakan instrumen penilaian untuk mengukur keaktifan Pejabat Administrator dalam melakukan komunikasi internal melalui FGD kepada pegawai di lingkungannya termasuk mengukur mengenai *feedback* peserta terhadap kegiatan FGD yang dilaksanakan.

Parameter yang diukur berdasarkan beberapa aspek yaitu *delivery* (cara penyampaian materi oleh Pejabat Administrator), *understanding* (pemahaman peserta terhadap materi FGD), *learning enthusiasm* (antusiasme pegawai terhadap kegiatan FGD), *contribution to learning* (dampak kegiatan FGD kepada peningkatan kapasitas pegawai). Target tahun 2021 adalah sebesar nilai 80.

10. Pengelolaan Keuangan yang Optimal

Sasaran strategis pengelolaan keuangan yang optimal terdapat 1 (satu) IKU yaitu: Persentase kualitas pelaksanaan anggaran.

Salah satu sumber daya organisasi sektor publik/pemerintahan adalah anggaran. Anggaran yang tersedia harus dikelola dengan berkualitas yang ditandai dengan anggaran terserap sesuai rencana yang telah ditetapkan, tercapainya output, efisiensi, konsistensi pelaksanaan anggaran, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan anggaran adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang sesuai ketentuan yang menjadi dasar pengelolaan belanja. Anggaran adalah salah satu sumber daya dalam organisasi. Pengelolaan anggaran yang optimal adalah penggunaan anggaran untuk mendorong organisasi mencapai hasil kinerja yang maksimal.

Sasaran strategis Pelaksanaan anggaran yang optimal terdiri dari 1 (satu) IKU, yaitu Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dengan target tahun 2021 sebesar 95,5%,.

Selanjutnya, pembahasan Akuntabilitas Kinerja dalam Bab III mengacu pada Capaian IKU, Evaluasi dan Analisis Kinerja, serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2021, terhadap 20 (dua puluh) IKU Kemenkeu-*Three* Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV Tahun 2021 telah memperoleh hasil yang maksimal. Hal ini terlihat dari capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Jakarta IV sebesar 108,91.

Adapun rincian capaian kinerja atas 20 (dua puluh) IKU Kemenkeu-*Three* KPKNL Jakarta IV Tahun 2021 dapat dijelaskan sesuai tabel dibawah ini:

Sasaran Strategis		IKU		Target	Realisasi	% (Indeks batas Maks)
SS 1	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	1.1	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	62%	67,45%	108,78%
		1.2	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	122,17%	120%
		1.3	Persentase Penurunan outstanding piutang negara	100%	104%	103,53%
SS 2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2.1	Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	88,50 (Skala 100)	99,48	112,41%
		2.2	Persentase realisasi pokok lelang	100%	166,98%	120%
SS 3	Birokrasi dan Layanan Publik yang <i>Agile</i> , Efektif, dan Efisien	3.1	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	4,74 (Skala 5)	4,75	100,21%
SS 4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif	4.1	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	100%	121,43%	120%

Sasaran Strategis		IKU		Target	Realisasi	% (Indeks batas Maks)
		4.2	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	100%	100%	100%
		4.3	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	100%	0,04%	120,00%
SS 5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	5.1	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	100%	80,29%	80,29%
		5.2	Persentase produktivitas lelang	35%	50,61%	120%
		5.3	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	92%	100%	108,70%
		5.4	Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	12,5%	0,02%	120%
SS 6	Edukasi yang efektif	6.1	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	95,5 (Skala 100)	97,68	102,28%
SS 7	Pengawasan dan pengendalian yang efektif	7.1	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%	88,95%	104,65%
SS 8	SDM yang Kompeten	8.1	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	116%	116%
SS 9	Organisasi yang <i>fit-for-purpose</i>	9.1	Nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBBM	85 (Skala 100)	84,00	98,82%
		9.2	Nilai hasil <i>review</i> pengelolaan kinerja	75 (Skala 100)	96,19	120,00%
		9.3	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	80 (Skala 100)	97,90	120,00%
SS 10	Pengelolaan Keuangan yang Optimal	10.1	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	94,76%	99,23%

Dari hasil evaluasi kinerja terhadap 20 (dua puluh) IKU Kemenkeu-*Three* Tahun 2021 diperoleh hasil analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kemenkeu-*Three* Tahun 2021 sebagai berikut:

1. **Sasaran Strategis 1: Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal dengan 3 (tiga) IKU, yaitu :**

IKU 1.1: Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

Realisasi Tingkat Outstanding Piutang Negara Persentase pengukuran Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK pada kantor pelayanan KPKNL Jakarta IV tahun 2021 adalah 67,45 % dari target sebesar 62%, dengan rician sebagai berikut.

Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	Target 2021	Realisasi
Tingkat Kesesuaian SBSK K/L Baru (2021)	Bobot 75%	76,84%
Monev Tingkat Kesesuaian SBSK Tahun 2020	Bobot 25%	39,26%
	62%	67,45%

IKU 1.2: Persentase Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang

Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara (BMN), kekayaan negara dipisahkan (KND), kekayaan negara lain-lain (KNL), penilaian, piutang negara, dan lelang. Manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan negara merupakan nilai penerimaan negara yang telah masuk ke kas negara yang diperoleh dari hasil pengelolaan kekayaan negara. Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari penerimaan, dan hasil pemanfaatan maupun penjualan BMN pada Kementerian/Lembaga.

Nilai manfaat ekonomi dari kegiatan pengelolaan kekayaan negara diperoleh melalui:

1. PNBP Aset (PNBP Aset)

- a) Penerimaan dari hasil pemanfaatan aset yang dikelola oleh Kanwil DJKN dan KPKNL yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada K/L bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan.

- b) Penerimaan dari hasil pemindahtanganan aset yang dikelola oleh Kanwil DJKN dan KPKNL yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada K/L bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan.

Target PNBPN Aset tahun 2020 sebesar Rp32,820,000,000.00 (Tiga puluh dua miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah).

2. PNBPN Piutang Negara

Penerimaan ini berasal dari biaya administrasi pengurusan piutang negara yang ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku antara lain:

- Pembayaran/pelunasan piutang negara dikenakan biaya administrasi 1% jika pembayaran/pelunasan dilakukan sebelum 6 bulan sejak SP3N terbit atau 10% jika pembayaran/pelunasan dilakukan setelah 6 bulan sejak SP3N terbit.
- Penarikan piutang negara oleh penyerah piutang dikenakan biaya administrasi sebesar 2,5%.

Target PNBPN Piutang Negara tahun 2021 sebesar Rp2,156,456,932.91 (Dua miliar seratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh dua koma sembilan puluh satu rupiah).

3. PNBPN Lelang.

Penerimaan ini berasal dari pelayanan lelang yang dilakukan oleh KPKNL Jakarta IV kepada pengguna jasa. PNBPN lelang terdiri dari:

- a. bea lelang;
- b. bea lelang pegadaian;
- c. denda keterlambatan penyeteroran bea lelang oleh PL Kelas II/Balai Lelang;
- d. biaya permohonan lelang;
- e. penerimaan dari uang jaminan pembeli wanprestasi;
- f. pemberian izin operasional Balai Lelang;
- g. pengangkatan dan perpanjangan PL Kelas II;
- h. perolehan kertas sekuriti oleh PL Kelas II; dan
- i. penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang.

Target PNBPN Lelang tahun 2021 sebesar Rp13,085,000,000,00 (Tiga belas miliar delapan puluh lima juta rupiah).

**Tabel Realisasi Penerimaan Bukan Pajak
Per 31 Desember 2021**

Uraian	Target	Realisasi	
		Jumlah	Persentase
a. PNBPN Pengelolaan BMN	Rp32,820,000,000.00	Rp39,260,915,041	119,62
b. PNBPN Piutang Negara	Rp2,156,456,932.91	Rp2,270,185,223	105,27
c. PNBPN Lelang	Rp13,085,000,000.00	Rp17,187,687,555	131,35
Realisasi IKU	Rp58,718,787,819	Rp58,718,787,819	122,17%

Realisasi IKU Persentase realisasi nilai manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan negara tercapai 129,11% dari target yang ditetapkan.

IKU 1.3: Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara

Realisasi Tingkat Outstanding Piutang Negara pada kantor pelayanan KPKNL Jakarta IV tahun 2021 adalah 103,53% dari target sebesar 100%, dengan rincian sebagai berikut.

Keterangan	Target	Realisasi	% Capaian
Saldo PNDS s.d 2017	Rp192,573,422,774.16	Rp199,378,027,303.99	103,53 %

2. Sasaran Strategis 2: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama, yaitu :

IKU 2.1: Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang

Realisasi Rata-rata persentase layanan unggulan yang dicapai pada tahun 2021 sebesar 99,489 dari target yang ditetapkan sebanyak 88,50. Pencapaian target sebesar 112,41%.

IKU 2.2: Persentase realisasi pokok lelang

Realisasi persentase hasil lelang (pokok lelang) pada kantor pelayanan KPKNL Jakarta IV tahun 2021 adalah 166,98% dari target sebesar 100%, dengan rincian capaian sebagai berikut.

Pokok Lelang	Target 2021	Realisasi	Capaian
PL Kelas I	Rp233.000.000.000	Rp269,377,549,777	
Pegadaian	Rp119.000.000.000	Rp318,388,079,500	
Jumlah	Rp352.000.000.000	Rp587,765,629,277	166,98%

3. Sasaran Strategis 3: Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*, Efektif, dan Efisien dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama, yaitu :

IKU 3.1: Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL

Realisasi survei Indeks kepuasan pengguna layanan pada kantor pelayanan KPKNL Jakarta IV tahun 2021 ditetapkan sebesar 4,75 dari target yang ditetapkan sebanyak 4,74. Pencapaian target sebesar 100,21%.

4. Sasaran Strategis 4: Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama, yaitu:

IKU 4.1: Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan

Pelaksanaan sertifikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah. BMN berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Negara/Lembaga yang menguasai dan/atau menggunakan BMN.

Tujuan pensertifikatan BMN antara lain untuk memberikan kepastian hukum atas BMN berupa tanah, memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, melaksanakan tertib administrasi BMN berupa tanah, dan mengamankan BMN berupa tanah. Ruang lingkup pensertifikatan BMN berupa tanah meliputi: tanah yang belum bersertifikat ataupun tanah yang sudah bersertifikat tetapi belum atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Negara/lembaga.

Realisasi persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan yang dicapai pada tahun 2021 sebesar 121,43% dari target yang ditetapkan sebanyak 100%. Terdapat 14 target bidang tanah BMN yang disertifikatkan di 2021, dan realisasi di akhir 2021 adalah sebanyak 17 bidang tanah BMN yang selesai disertifikatkan.

IKU 4.2: Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)

Realisasi Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) yang dicapai pada tahun 2021 sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 100%. Tercatat ada 157 target portofolio aset di 2021, dan semuanya berhasil direalisasikan.

IKU 4.3: Deviasi ketergunaan hasil penilaian

Realisasi deviasi ketergunaan hasil penilaian yang dicapai pada tahun 2021 sebesar 0,04% dari target yang ditetapkan sebanyak 22%. Pencapaian target sebesar 120%.

5. **Sasaran Strategis 5: Tata kelola kekayaan negara yang akuntabel** Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama, yaitu :

IKU 5.1: Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN

Realisasi persentase efektivitas penyelesaian BKPN yang dicapai pada tahun 2021 sebesar 80,29% dari target yang ditetapkan sebanyak 100%. Pencapaian sampai 31 Desember 2021 yang tercatat adalah sejumlah 2248 BKPN yang selesai diproses.

IKU 5.2: Persentase produktivitas lelang

Realisasi persentase produktivitas e-lelang yang dicapai pada tahun 2021 sebesar 50,61% dari target yang ditetapkan sebanyak 35%, atau pencapaian target sebesar 120% dari frekuensi lelang yang dilakukan di tahun 2021. Realisasi target dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel Realisasi Hasil Lelang
Per 31 Desember 2021**

Keterangan	Frekuensi Lelang	Frekuensi Lelang Laku	% Capaian
Realisasi IKU	409	207	50,61%

IKU 5.3: Persentase pelaksanaan lelang *e-auction* dan *e-conventional auction*

Realisasi pelaksanaan lelang *e-auction* dan *e-conventional auction* dicapai pada tahun 2021 sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 92%. Realisasi target dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel Realisasi Persentase produktifitas lelang
Per 31 Desember 2021**

Jenis Lelang	Frekuensi	Jumlah Frekuensi	%
<i>e-Auction</i>	409	409	100%
<i>e-Conventional Auction</i>	-		0%
Jumlah			100%

IKU 5.4: Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN

Realisasi Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN yang dicapai pada tahun 2021 sebesar 0,02% dari target yang ditetapkan sebanyak 12,50%. Pencapaian target sebesar 120%. Dengan rincian sebagai berikut.

Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	Target 2021	Realisasi	Capaian
Deviasi Data PNBPN Lelang	10%	0,04%	
Deviasi Data PNBPN Piutang Negara	15%	0,00%	
Rata-Rata Target	12,5%	0,02%	120%

6. Sasaran Strategis 6: Edukasi yang Efektif dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama, yaitu:

IKU 6.1: Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi

Realisasi tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi pada tahun 2021 tercapai sebesar 97,68 dari target yang ditetapkan sebesar 95,5 atau tercapai 102,28%.

7. Sasaran Strategis 7: Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama, yaitu:

IKU 7.1: Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara

Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada K/L terutama terkait aspek utilisasi-nya. IKU

ini difokuskan pada pemantauan utilisasi berupa pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh DJKN selaku pengelola barang.

Realisasi pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN pada tahun 2021 tercapai sebesar 88,95% dari target yang ditetapkan sebesar 85%. Pencapaian target sebesar 104,65%.

Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester II 2020 yang ditindaklanjuti oleh K/L	94
Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester I 2021 yang ditindaklanjuti oleh K/L	67
Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester II 2021	108
Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester I 2021	73
Capaian IKU	88,95%

8. Sasaran Strategis 8: SDM yang Kompeten dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama, yaitu :

IKU 8.1: Persentase pengembangan kompetensi pegawai

Realisasi persentase pengembangan kompetensi pegawai pada tahun 2021 tercapai 116% dengan target sebesar 100%. Pencapaian 116% tersebut diperoleh dari seluruh pegawai di seksi teknis KPKNL Jakarta IV yang telah mengikuti kegiatan yang diselenggarakan di BPPK sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi seksi masing-masing yang meliputi seminar, sosialisasi, *internship/on the job training*, *basic training* (DTSD, Semapta), Pembelajaran Jarak Jauh, *workshop*, bimbingan teknis, *sharing session*, dan juga *in-house training*. KPKNL Jakarta IV memberikan kesempatan luas terhadap seluruh pegawainya dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai.

9. Sasaran Strategis 9: Organisasi yang Fit For Purpose dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama, yaitu :

IKU 9.1: Nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBBM

Realisasi pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBBM yang dicapai pada tahun 2021 sebesar 84 dari target yang ditetapkan sebanyak 85, sehingga pencapaian target adalah sebesar 98,82%. Belum terpenuhinya capaian dari

target ini disebabkan karena dokumen kelengkapan WBBM pada Triwulan II masih harus dipenuhi/dilengkapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga KPKNL Jakarta IV belum berhasil sebagai kandidat penerima kriteria ZI – WBBM di tahun 2021.

IKU 9.2: Nilai hasil *review* pengelolaan kinerja

Realisasi nilai hasil *review* pengelolaan kinerja yang dicapai pada tahun 2021 sebesar 96,19 dari target yang ditetapkan sebanyak 75. Pencapaian target sebesar 120%

IKU 9.2:) Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator

Realisasi Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Pejabat Administrator yang dicapai pada tahun 2021 sebesar 97,90 dari target yang ditetapkan sebanyak 80. Pencapaian target sebesar 120%.

10. Sasaran Strategis 10: Pengelolaan Keuangan yang Optimal dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama, yaitu :

IKU 10.1: Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

Realisasi Persentase kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2021 adalah sebesar 94,23%, lebih rendah dari target yang ditetapkan yaitu 95,50% atau tercapai 99,23%.

B. Realisasi Anggaran

Untuk pembiayaan satuan kerja di lingkungan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV dalam Tahun 2021 telah dialokasikan di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021. Dari keseluruhan anggaran yang tersedia dengan jumlah sebesar Rp1,942,636,000.00 tersebut pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp1,854,674,978.00 atau sebesar 95% dari pagu yang telah ditetapkan. Untuk rincian realisasi anggaran sebagai berikut::

**Tabel Laporan Pagu Dana Per Jenis Belanja
Berdasarkan Online Monitoring SPAN
Per 31 Desember 2021**

No	PROGRAM	Pagu Dalam DIPA (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persen (%)
1.	Belanja pegawai	0	0	100
2.	Belanja Barang	1,555,392,000,00	1,467,430,978,00	94
3.	Belanja Modal	387,244,000,00	387,244,000,00	100
Jumlah		1,942,636,000,00	1,854,674,978,00	95,47

Pada tahun 2021 ini, perhitungan persentase penyerapan anggaran sama dengan tahun 2020. Perhitungan realisasi IKU terdiri dari komponen persentase penyerapan anggaran, persentase keluaran riil, efisiensi, dan konsistensi. Adapun perhitungannya adalah:

$$\text{Persentase IKU} = (\text{IKPA} \times 40\%) + (\text{SMART DJA} \times 60\%)$$

**Tabel IKPA Berdasarkan Online Monitoring SPAN
Per 31 Desember 2021**

No	INDIKATOR IKPA	Capaian
A.) Nilai IKPA		96,46%
1.	Pengelolaan UP	7,60%
2.	Data Kontrak	10,00%
3.	Kesalahan SPM	4,50%
4.	Retur SP2D	5,00%
5.	Hal III DIPA	4,51%
6.	Revisi DIPA	5,00%
7.	Penyelesaian Tagihan	10,00%
8.	Konfirmasi Capaian Output	17,00%
9.	Rekon LPJ	5,00%
10.	Perencanaan Kas	0,00%
11.	Realisasi	13,02%
12.	Pagu Minus	5,00%
13.	Dispensasi SPM	5,00%
B. Nilai SMART		93,63%
Capaian Tahun 2021		94,76%

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan Umum

Laporan Kinerja KPKNL Jakarta IV tahun 2021 yang telah disusun ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan kegiatan KPKNL Jakarta IV sebagai salah satu unit penyelenggara pemerintah. Penyusunan laporan kerja untuk mengetahui apakah kinerja yang telah dilaksanakan sudah mencapai hasil yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dapat dilakukan karena capaian yang hendak dicapai telah ditetapkan dalam dokumen kontrak kinerja yang dan dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama tahun 2021. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai instansi pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. KPKNL Jakarta IV telah mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Dalam situasi dan kondisi yang sangat fluktuatif, tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang semakin berat dan penuh tantangan, namun demikian, KPKNL Jakarta IV senantiasa berusaha mengatasi tantangan tersebut sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan dengan optimal. Hal ini tercermin dari pencapaian IKU pada tahun 2021 yang memuaskan dan secara keseluruhan Nilai Kinerja Organisasi KPKNL Jakarta IV mencapai 108.91%.

B. Strategi Pemecahan Masalah Untuk Tahun Mendatang

Dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, KPKNL Jakarta IV mempunyai beberapa strategi, antara lain:

1. Meningkatkan persepsi masyarakat dan *stakeholder* lelang melalui sosialisasi untuk mendorong pemahaman terhadap lelang sebagai cara penjualan barang yang menghasilkan harga yang optimal;
2. Mengoptimalkan penyelesaian piutang negara sesuai dengan peraturan yang berlaku dan melaksanakan rekonsiliasi data hutang dengan penanggung hutang dalam rangka peningkatan kualitas data dalam upaya menunjang penyelesaian piutang negara serta percepatan pengurusan Piutang Negara;

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pendidikan dan latihan, peningkatan kualitas perencanaan pekerjaan, dan melaksanakan monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja yang telah dijadwalkan dalam rangka mengatasi beban kerja yang ada dan keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja tahun 2021, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan baik kepada pimpinan di Kementerian Keuangan sebagai bahan acuan pengambilan keputusan dalam rangka penyusunan rencana strategis maupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), maupun kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPKNL Jakarta IV. Laporan Kinerja tahun 2021 kiranya dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja KPKNL Jakarta IV pada periode berikutnya.